



LAPORAN

PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN DIKLAT

**PUSAT KAJIAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR I
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TAHUN 2015**

LAPORAN

PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN DIKLAT



**PUSAT KAJIAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR I
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
2015**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya sehingga kegiatan pemantauan dan pengendalian penyelenggaraan diklat di daerah dapat terlaksana dengan baik. Program pemantauan dan pengendalian penyelenggaraan diklat di daerah merupakan salah satu program pembinaan lembaga diklat didaerah yang perupakan salah satu fungsi pembinaan yang dilakukan PKP2A I LAN. Aspek- aspek yang dimonitoring dalam kegiatan pemantauan dan pengendalian lembaga diklat ini adalah komponen- komponen pelayanan dalam proses diklat, widyaiswara, pengelola dan penyelenggara diklat .

Hasil dari pelaksanaan kegiatan monitoring ini adalah termonitornya lembaga diklat didaerah, terinventarisirnya masalah sehingga LAN sebagai pembina dapat memberikan *feedback* dalam bentuk advokasi atau perkonsultasian maupun memberikan *feedback* dalam bentuk regulasi kediklatan. Dengan demikian tujuan peningkatan kualitas penyelenggaraan diklat di daerah dapat terwujud dengan baik. Kegiatan pemantauan dan pengendalian lembaga diklat sendiri di laksanakan di 8 lokus lembaga diklat Provinsi di wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

Kami menyadari bahwa hasil kegiatan pemantauan dan pengendalian lembaga diklat didaerah yang terakomodasi dalam laporan ini masih terdapat banyak kekurangan.Untuk itu kami mengharapkan masukan sehingga laporan ini dapat lebih bermanfaat untuk yang berkepentingan. Kami juga mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian kegiatan ini.

Sumedang, Desember 2015

Tim Pemantauan dan pengendalian

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	Hal i
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A Latar Belakang	1
B Tujuan	5
C Sasaran	6
D Lokus	6
BAB II KOMPONEN DAN METODE	8
A Komponen Pemantauan	8
B Mekanisme	12
C Tahapan Persiapan Pemantauan dan Pengendalian	13
D Tahapan Visitasi Ke Lembaga Diklat	15
E Tahapan Penyusunan Laporan	17
BAB III PENYELENGGARAAN DIKLAT	21
A Gambaran Umum	21
B Kebutuhan Penguatan Kapasitas	25
BAB IV MODEL PENGUATAN JEJARING KERJA KEDIKLATAN	27
A Urgensi Penguatan Jejaring Kerja	27
B Model Penguatan Jejaring Kerja dan Manfaat Kemitraan	29
BAB IV PENUTUP	36

A	Kesimpulan	36
B	Rekomendasi	36

LAMPIRAN – LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pendidikan dan pelatihan sebagai sarana pengembangan sumber daya manusia memiliki peran yang sangat strategis. Peran strategis pendidikan dan pelatihan selain untuk membangun dan meningkatkan kompetensi, sikap dan perilaku juga sebagai sarana dalam memenuhi kebutuhan kompetensi dan keterampilan aparatur sesuai dengan kebutuhan organisasi. Untuk menghasilkan output pendidikan dan pelatihan yang benar- benar kompeten, pihak- pihak yang terkait kediklatan harus mampu mempersiapkan aspek- aspek kediklatan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Undang - undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara mengamanatkan bahawa Lembaga Administrasi Negara memiliki fungsi diantaranya pengembangan standar kualitas pendidikan dan pelatihan Pegawai ASN; pembinaan pendidikan dan pelatihan kompetensi manajerial Pegawai ASN; penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kompetensi manajerial Pegawai ASN baik secara sendiri maupun bersama-sama lembaga pendidikan dan pelatihan lainnya; melakukan akreditasi lembaga pendidikan dan pelatihan Pegawai ASN, baik sendiri maupun bersama lembaga pemerintah lainnya.

Amanat tersebut tentunya menjadi bagian penting bagi Lembaga Administrasi Negara dalam melaksanakan tugasnya. Dari empat fungsi di bidang kediklatan tersebut tentunya LAN harus mampu menciptakan instrumen yang tepat dalam melaksanakan tugas

tersebut agar dapat berjalan dengan efektif. Fungsi ini tentunya memiliki kaitan erat dengan tugas kepemerintahan dan birokrasi di Indonesia. Agenda pembangunan dan pemerintahan dewasa ini memiliki tantangan baik internal maupun eksternal, yang menjadi sorotan masyarakat khususnya aspek internal birokrasi sendiri adalah kompetensi aparatur yang belum maksimal. Sebagai lembaga pembina pendidikan dan pelatihan tentunya LAN memiliki peran yang strategis dalam menjaga kualitas penyelenggaraan untuk menciptakan aparatur yang profesional yang memiliki integritas dan etika publik.

Dalam pelaksanaanya, penyelenggaraan diklat tentunya tidak hanya dilakukan oleh LAN tetapi juga dilakukan oleh berbagai lembaga kediklatan pemerintah daerah maupun pusat. LAN dalam hal ini sebagai komponen birokrasi, lembaga-lembaga Diklat pemerintah tentu berkewajiban untuk mendukung agenda pembangunan nasional tersebut, sesuai dengan peran dan tanggungjawabnya. Salah satunya adalah dengan memfokuskan pada upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan diklat sebagai salah satu strategi pengembangan kompetensi dan profesionalisme sumber daya manusia (SDM) aparatur. Lembaga Diklat, oleh karenanya, harus mampu menjadi daya ungkit (*leverage*) yang paling kuat dalam rangka mewujudkan sosok pegawai negeri sipil yang kompeten dan profesional, melalui upaya-upaya inovasi, dan pengembangan dalam program, kurikulum, metode, serta sarana dan prasarana diklat.

Dengan demikian, peranan program pendidikan dan pelatihan (diklat) dalam upaya meningkatkan kompetensi dan kualitas SDM aparatur sangatlah strategis. Diklat tetap dianggap sebagai upaya

organisasi yang memiliki pengaruh yang signifikan dalam peningkatan kompetensi pegawai, karena diklat merupakan proses pembelajaran yang dirancang dan dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan untuk meningkatkan kompetensi peserta agar mereka mampu melaksanakan tugas-tugas pekerjaanya secara profesional. Dengan meningkatnya kompetensi yang dimiliki para peserta, maka kinerja individu mereka sekembalinya ke tempat kerja diharapkan akan meningkat, dan pada akhirnya, kinerja organisasi secara keseluruhan pun akan meningkat pula.

Namun demikian, dalam tataran praktis, penyelenggaraan berbagai program diklat masih menemui banyak kendala dimulai dari tidak terstandarnya kurikulum, minimnya kualitas pembelajaran, kurang jelasnya evaluasi hasil belajar, serta tidak tersedianya dukungan sarana dan prasarana diklat yang memadai. Bahkan, para pemangku kepentingan (*stake-holders*) kediklatan di daerah melihat bahwa program diklat sudah cenderung jatuh pada rutinitas kegiatan yang berorientasi anggaran saja (*budget driven*), bukan kegiatan pembelajaran untuk meningkatkan kapasitas para peserta diklat. Alih-alih meningkatkan kompetensi dan kinerja pegawai, penyelenggaraan diklat dianggap sebagai kegiatan *refreshing* dari rutinitas kerja keseharian.

Untuk itu, peningkatan kualitas penyelenggaraan diklat harus terus menerus dilakukan. Penyelenggaraan diklat harus mampu mewujudkan tujuan idealnya yaitu *proses transformasi kualitas SDM aparatur Negara* yang menyentuh empat dimensi utama, yaitu ; *dimensi spiritual, intelektual, emosional dan fisikal*. Keempat dimensi ini bisa diwujudkan apabila implementasi pelaksanaan diklat

dilapangan benar-benar mengedepankan kualitas, para penyelenggaranya memiliki komitmen yang tinggi kepada proses pembelajaran, dan sarana-prasaranaanya disiapkan secara efektif.

Agar pelaksanaan program diklat PNS dapat berjalan dengan baik dan mencapai sasaran seperti yang diharapkan serta terjaga kualitas dan akuntabilitasnya, Lembaga Administrasi Negara sebagai intansi pembina diklat PNS perlu melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan diklat yang dilaksanakan oleh Lembaga Diklat. Untuk melakukan pengawasan ini, LAN perlu melakukan Pemantauan dan Pengendalian Penyelenggaraan Diklat PNS yang dilaksanakan oleh Lembaga Diklat di daerah.

Sebagaimana diketahui, sebagai implementasi dari manajemen mutu penyelenggaraan diklat, Lembaga Diklat sebenarnya telah melakukan upaya pengawasan secara internal. Untuk itu, Pemantauan dan Pengendalian penyelenggaraan Diklat PNS yang dilakukan oleh LAN merupakan kegiatan lanjutan pelaksanaan Pemantauan dan Pengendalian internal yang dilaksanakan oleh Lembaga Diklat secara internal dan laporannya kemudian disampaikan kepada LAN. Berdasar data hasil Pemantauan dan Pengendalian Internal Lembaga Diklat, maka PKP2A I LAN menugaskan tim pemonitoring diklat tsebagai reviewer untuk melakukan Pemantauan dan Pengendalian terhadap berbagai program diklat PNS yang diselenggarakan oleh Lembaga Diklat.

Program Pemantauan dan Pengendalian penyelenggaraan diklat ini diharapkan dapat menjamin bahwa penyelenggaraan diklat yang dilakukan sesuai dengan rencana dengan mengedepankan unsur kualitas. Selanjutnya hasil Pemantauan dan Pengendalian ini

juga menjadi bahan pertimbangan untuk melanjutkan atau menghentikan pelaksanaan diklat PNS berdasar hasil evaluasi.

Agar pelaksanaan Pemantauan dan Pengendalian Penyelenggaraan Diklat PNS dapat berjalan dengan baik dan lancar, maka Pemantauan dan Pengendalian Penyelenggaraan Diklat PNS dijadikan agenda program pembinaan bagi PKP2A I LAN dalam menjalankan tugas pembinaan kediklatan di daerah. Fokus dalam kegiatan pemantauan dan pengendalian penyelenggaraan diklat ini adalah Pengembangan standar kualitas pendidikan dan pelatihan Pegawai, pembinaan pendidikan dan pelatihan kompetensi manajerial Pegawai ASN dan standar penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan penjenjangan tertentu, serta pemberian akreditasi dan sertifikasi di bidangnya dengan melibatkan kementerian dan lembaga terkait.

B. TUJUAN

Tujuan yang ingin dicapai dalam Pemantauan dan Pengendalian Penyelenggaraan Diklat ini adalah tercapainya efektifitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan PNS yang diselenggarakan oleh lembaga diklat daerah yang meliputi efektifitas perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi program. Proses monitoring dan evaluasi difokuskan pada terpenuhinya standar penyelenggaraan diklat PNS. Tujuan kedua dari kegiatan ini adalah terbangunnya hubungan jejaring kerja kediklatana dengan semua mitra kerja PKP2A I LAN yakni Badan Diklat Provinsi Banten, Badan Diklat Provinsi Jabar, Badan Diklat Provinsi Badan Diklat Provinsi Jateng, Badan Diklat Provinsi DIY, Badan Diklat Provinsi Jatim,

Badan Diklat Provinsi Bali, Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Provinsi NTB dan Badan Diklat Provinsi NTT. Dalam jangka pendek hubungan mitra kerja kediklatan ini adalah adanya sarana komunikasi dan kolaborasi baik secara online maupun onsite sehingga penguatan kualitas kediklatan dapat dilakukan secara kolaboratif antar lembaga di wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara timur

C. SASARAN

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan Pemantauan dan pengendalian penyelenggaraan diklat Diklat PNS di Daerah adalah:

1. Mengidentifikasi berbagai masalah yang muncul dalam penyelenggaraan diklat aparatur di daerah;
2. Melakukan fungsi konsultasi untuk pemecahan masalah dalam rangka peningkatan kapasitas lembaga diklat di daerah;
3. Terbentuknya Jejaring Kerja Kediklatan jardiklat jabanubati dengan adanya komitmen bersama;
4. Menyusun laporan pemantauan dan pengendalian penyelenggaraan Diklat.

D. LOKUS

Lokus kegiatan pemantauan dan pengendalian penyelenggaraan diklat kediklatan tahun 2015 PKP2A I LAN Tahun 2015 Lembaga Diklat Pemerintah Daerah yang terdiri dari:

1. Badan Diklat Provinsi Banten
2. Badan Diklat Provinsi Jawa Barat

3. Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah
4. Badan Diklat Provinsi DIY
5. Badan Diklat Provinsi Jawa Timur
6. Badan Diklat Provinsi Bali
7. Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Provinsi Nusa Tenggara Barat
8. Badan Diklat Provinsi Nusa Tenggara Timur

BAB II

KOMPONEN DAN METODE

A. KOMPONEN PEMANTAUAN

Pada prinsipnya komponen yang dipantau dalam kegiatan monev ini mengacu pada instrumen utama yang telah disusun oleh Pusat Pengembangan Program dan Pembinaan Diklat (P3D LAN RI). Adapun komponen yang menjadi salah satu fokus yang dimonitoring adalah Pelayanan Pembelajaran, Pelayanan Modul, Pelayanan Evaluasi, Pelayanan Fasilitas Diklat, Pelayanan Biaya, Pelayanan Kode Registrasi, pengelola, widyaiswara dan penyelenggara diklat. Namun dalam pelaksanaan kegiatan pemantauan dan pengendalian diklat ini semua aspek yang menjadi elemen pendukung terhadap kualitas penyelenggaraan diklat di daerah juga di monitoring, seperti biaya, kapasitas atau kemampuan lembaga diklat dalam menyelenggarakan diklat, serta kebutuhan diklat untuk ASN di daerah.

Untuk melaksanakan kegiatan pemantauan dan pengendalian penyelenggaraan Diklat PNS pada lembaga diklat di wilayah binaan PKP2A I LAN, beberapa hal yang disiapkan baik dari instansi pembina diklat maupun dari lembaga diklat adalah sebagai berikut:

1.1 Pedoman Kediklatan

Pedoman kediklatan dibutuhkan sebagai acuan/ standar yang melandasi penyelenggaraan berbagai jenis dan program diklat PNS yang dilaksanakan oleh Lembaga Diklat. Untuk itu, Lembaga Diklat harus memiliki pemahaman yang jelas tentang berbagai aspek

penyelenggaraan diklat yang telah ditetapkan dalam pedoman tersebut. Adapun pedoman kediklatan pada umumnya disusun oleh instansi yang memiliki kewenangan untuk menyusun pedoman kediklatan, yaitu:

- Pedoman Diklat Prajabatan dan Kepemimpinan disusun dan ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara.
- Pedoman Diklat Teknis disusun dan ditetapkan oleh instansi pembina diklat teknis yaitu Kementerian dan Lembaga yang membidangi kompetensi teknis.
- Pedoman Diklat Fungsional disusun dan ditetapkan oleh instansi pembina diklat fungsional yaitu Kementerian atau Lembaga yang membina jabatan fungsional tertentu.

Lembaga Diklat harus memastikan bahwa seluruh penyelenggaraan Diklat PNS yang dilaksanakan oleh instansinya mengacu kepada Pedoman Penyelenggaraan Diklat yang telah ditetapkan oleh instansi yang berwenang.

1.2 Pembentukan Tim Pemantauan dan pengendalian

Kegiatan pemantauan dan pengendalian Diklat PNS ini akan dilaksanakan oleh tim pemantauan dan pengendalian yang ditetapkan oleh LAN sebagai pembina Diklat PNS. Untuk kelancaran kegiatan ini, Lembaga Diklat juga diharapkan dapat menyusun tim pendukung kegiatan pemantauan dan pengendalian yang akan menyiapkan berbagai data dan informasi yang dibutuhkan tim pemantauan dan pengendalian tersebut.

Tugas tim pemantauan dan pengendalian di Lembaga Diklat adalah membantu tim pemonitor dari LAN agar pelaksanaan pemantauan

dan pengendalian ini dapat berjalan secara efektif. Tugas-tugas tim pemantauan dan pengendalian Lembaga Diklat adalah:

- Mengumpulkan data tentang program diklat PNS baik prajabatan, kepemimpinan, teknis dan fungsional yang diselenggarakan oleh Lembaga Diklat.
- Mengupload data tentang program diklat PNS itu ke dalam sistem informasi diklat aparatur (SIDA) LAN.
- Membantu proses visitasi pemantauan dan pengendalian diklat ke Lembaga Diklat tersebut.

Tugas tim pemonitor LAN adalah sebagai berikut:

- Melakukan verifikasi data yang disampaikan Lembaga Diklat tentang program diklat pada tahun berjalan.
- Menyusun instrumen pemantauan dan pengendalian kegiatan diklat
- Melakukan visitasi kepada Lembaga Diklat untuk mengecek pelaksanaan penyelenggaraan Diklat
- Mengumpulkan dan menganalisis data hasil pemantauan dan pengendalian
- Menyusun laporan hasil pemantauan dan pengendalian Diklat

1.3 Data dan Informasi tentang Program Diklat

Tim pemantauan dan pengendalian yang dibentuk Lembaga Diklat harus mengumpulkan data-data yang terkait dengan rencana penyelenggaraan Diklat PNS pada tahun berjalan. Adapun data-data yang harus dikumpulkan dan kemudian diupload ke dalam SIDA LAN adalah sebagai berikut:

- Nama-nama program Diklat PNS yang akan diselenggarakan pada tahun anggaran berjalan baik Diklat Prajabatan, Kepemimpinan, teknis dan fungsional.
- Informasi tentang target jumlah peserta
- Kurikulum Diklat yang akan digunakan
- Rencana widyaiswara / fasilitator diklat
- Jumlah alokasi anggaran yang akan digunakan
- Jadwal waktu pelaksanaan
- Rencana sarana dan prasarana pembelajaran yang akan digunakan

1.4 Sarana dan prasarana pemantauan dan pengendalian

Sarana pendukung yang dibutuhkan oleh tim pemantauan dan pengendalian adalah sebagai berikut:

- Sistem informasi diklat baik di Lembaga Diklat maupun di LAN
- Instrumen pemantauan dan pengendalian
- Alat pemotret dan perekam kegiatan diklat
- Alat tulis kantor

1.5 Data Anggaran Penyelenggaraan

Data anggaran diperoleh dengan cara lembaga diklat mengisi kuisioner tau form isian yang telah disampaikan oleh PKP2A I LAN. Data ini diperlukan untuk memetakan kapasitas penyelenggraan diklat di lingkungan wilayah binaan atau mitra kerja PKP2A I LAN.

1.6 Data Formasi Kebutuhan Diklat dari BKD

Data kebutuhan diklat dari BKD diperoleh dengan cara mengirimkan formulir isian ke setiap BKD provinsi dan Kabupaten Kota yang ada di Jawa Barat. Data ini diperlukan untuk memperoleh informasi berapa kebutuhan diklat kepemimpinan, teknis dan fungsional yang dibutuhkan oleh setiap BKD Provinsi, Kabupaten dan Kota di wilayah Jawa Barat.

B. MEKANISME

2.1 Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan pemantauan dan pengendalian Diklat PNS ini merupakan kegiatan terpadu yang melibatkan tim pemantauan dan pengendalian dari Lembaga Administrasi Negara (LAN), tim pendamping pemantauan dan pengendalian dari Lembaga Diklat, serta widyaiswara, pengelola dan penyelenggara Diklat PNS yang bekerja di Lembaga Diklat. Tujuan akhir dari pemantauan dan pengendalian ini adalah terwujudnya kualitas penyelenggaraan Diklat PNS yang tinggi yang berdampak pada peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur.

Pemantauan dan pengendalian kegiatan Diklat PNS ini terdiri atas tiga tahapan kegiatan, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan penyusunan laporan hasil. Tahapan persiapan dan pelaksanaan melibatkan empat komponen, yaitu Tim Pemantauan dan pengendalian LAN dan Tim Pendamping Pemantauan dan pengendalian Lembaga Diklat, Widyaaiswara, Pengelola, dan Penyelenggara. Tahapan penyusunan laporan hanya melibatkan Tim Pemantauan dan pengendalian Diklat LAN.

2.2 Tahapan Kegiatan Pemantauan dan pengendalian

Secara garis besar, tahapan pelaksanaan pemantauan dan pengendalian ini dapat dikelompokkan ke dalam empat kegiatan pokok yaitu, 1) persiapan pemantauan dan pengendalian, 2) pelaksanaan visitasi, dan 3) Focus Group Discussion Penyusunan Konsep Penguatan Jejaring Kerja Kediklatan 3) penyusunan laporan hasil pemantauan dan pengendalian. Penjelasan setiap tahapan adalah sebagai berikut:

C. TAHAPAN PERSIAPAN PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN

Pada tahapan ini, Lembaga Administrasi Negara dan Lembaga Diklat yang akan menyelenggarakan Diklat PNS pada tahun berjalan mempersiapkan berbagai hal yang diperlukan untuk pelaksanaan pemantauan dan pengendalian. Informasi yang sangat penting sebagai bahan dasar untuk pemantauan dan pengendalian adalah informasi tentang rencana kegiatan Diklat PNS yang akan dilaksanakan oleh Lembaga Diklat, baik itu Diklat Prajabatan, Diklat Kepemimpinan, Diklat Teknis maupun Diklat Fungsional. Pada tahapan ini, beberapa kegiatan spesifik yang dilaksanakan baik oleh LAN maupun oleh Lembaga Diklat adalah:

1) Surat Pemberitahuan Rencana Pemantauan dan pengendalian dari LAN kepada Lembaga Diklat

Surat pemberitahuan ini berisi tentang rencana tim pemantauan dan pengendalian dari LAN untuk melakukan kegiatan

pemantauan dan pengendalian Diklat PNS pada tahun berjalan. Untuk itu,

2) Pengisian aplikasi monitoring online

Setiap lembaga diklat diminta untuk mengisi aplikasi monev online PKP2A I LAN pada halaman www.monev.bandung.lan.go.id dan melengkapi data pada sistem informasi diklat aparur LAN RI. Data- data yang telah dilengkapi akan menjadi bahan tim untuk melakukan visitasi.

3) Pembentukan Tim Pendamping Pemantauan dan pengendalian Lembaga Diklat

Segera setelah mendapatkan surat pemberitahuan tentang rencana pelaksanaan kegiatan pemantauan dan pengendalian Diklat PNS dari LAN, Lembaga Diklat kemudian membentuk tim pendamping pemantauan dan pengendalian yang akan mendukung pelaksanaan kegiatan pemantauan dan pengendalian tersebut. Tim pendamping pemantauan dan pengendalian Lembaga Diklat ini adalah tim atau satuan kerja yang ditugaskan untuk pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu lembaga yang dikoordinasikan oleh Kepala Lembaga Diklat atau Bagian Administrasi. Tugas tim pendamping pemantauan dan pengendalian adalah:

- Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pemantauan dan pengendalian
- Mengumpulkan data-data yang dibutuhkan untuk kegiatan pemantauan dan pengendalian

- Mengupload data-data rencana kegiatan diklat dan data lembaga diklat ke dalam website SIDA-LAN.
- Mendampingi tim pemantauan dan pengendalian LAN pada saat visitasi kegiatan diklat.

D. TAHAPAN VISITASI KE LEMBAGA DIKLAT

1) Persiapan visitasi oleh tim pemantauan dan pengendalian LAN

Persiapan visitasi dilakukan dengan menggunakan data-data yang telah diupload oleh Lembaga Diklat. Dalam kegiatan ini, tim pemantauan dan pengendalian LAN melaksanakan beberapa kegiatan yaitu:

- Penyusunan instrumen pemantauan dan pengendalian yang terdiri dari: 1) instrumen kuesioner, dan 2) instrumen wawancara dan *focus group discussion*. Penyusunan instrumen ini didasarkan kepada data-data yang telah dikirimkan oleh Lembaga Diklat.
- Penetapan jadwal visitasi untuk membagi siapa saja anggota tim pemantauan dan pengendalian yang akan berkunjung kepada Lembaga Diklat yang mana, sebelum melaksanakan visitasi tim melakukan rapat teknis kegiatan pemantauan dan pengendalian terlebih dahulu .
- Pembahasan data dengan tim untuk selanjutnya menjadi fokus dalam kegiatan monev

2) Persiapan visitasi oleh tim pendamping pemantauan dan pengendalian Lembaga Diklat.

Kegiatan visitasi yang dilakukan oleh tim pemantauan dan pengendalian LAN dilakukan secara acak dan diberitahukan hanya satu hari sebelum pelaksanaan visitasi. Kegiatan visitasi yang mendadak ini dilakukan dalam rangka menghindari upaya-upaya rekayasa penyelenggaraan diklat, sehingga tim pemantauan dan pengendalian akan mengobservasi kegiatan diklat PNS apa adanya. Beberapa persiapan kegiatan pemantauan dan pengendalian oleh tim pendamping Lembaga Diklat terdiri dari kegiatan:

- Memastikan bahwa jadwal penyelenggaraan diklat itu dilaksanakan tepat pada waktunya. Apabila ada perubahan jadwal, maka tim secepatnya memberitahukan perubahan jadwal itu kepada tim pemantauan dan pengendalian LAN.
- Mendampingi tim pemantauan dan pengendalian LAN untuk keperluan transportasi dan data-data yang dibutuhkan.
- Memastikan ketersediaan widyaswara, pengelola dan penyelenggara yang akan diminta waktunya untuk melakukan wawancara atau FGD.
- Membantu keperluan administrasi tim pemantauan dan pengendalian LAN.

3) Pelaksanaan Visitasi

Pelaksanaan visitasi oleh tim pemantauan dan pengendalian LAN dilaksanakan selama 2 hari kerja untuk melakukan observasi, wawancara dan FGD tentang pelaksanaan Diklat PNS yang dilaksanakan oleh Lembaga Diklat. Setiap tim pemantauan dan

pengendalian akan melakukan visitasi sebanyak minimal dua kali dalam satu tahun anggara, yang jadwanya disesuaikan dengan jadwal penyelenggaraan Diklat PNS di Lembaga Diklat. Dalam pelaksanaan visitasi ini, sasaran utama tim pemantauan dan pengendalian LAN adalah untuk mengumpulkan data tentang hal-hal sebagai berikut:

- Lembaga Diklat melaksanakan penyelenggaraan Diklat PNS sesuai dengan standar-standar yang telah ditetapkan dalam kebijakan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yang meliputi: 1) standar kurikulum, 2) standar proses pembelajaran, 3) standar widyaiswara dan fasilitator, 4) standar sarana belajar, 5) standar prasarana pendukung, 6) standar administrasi pendukung.
- Observasi dan wawancara yang dilakukan mesti mengecek pelaksanaan di lapangan sehingga tidak ada rekayasa penyelenggaraan diklat.

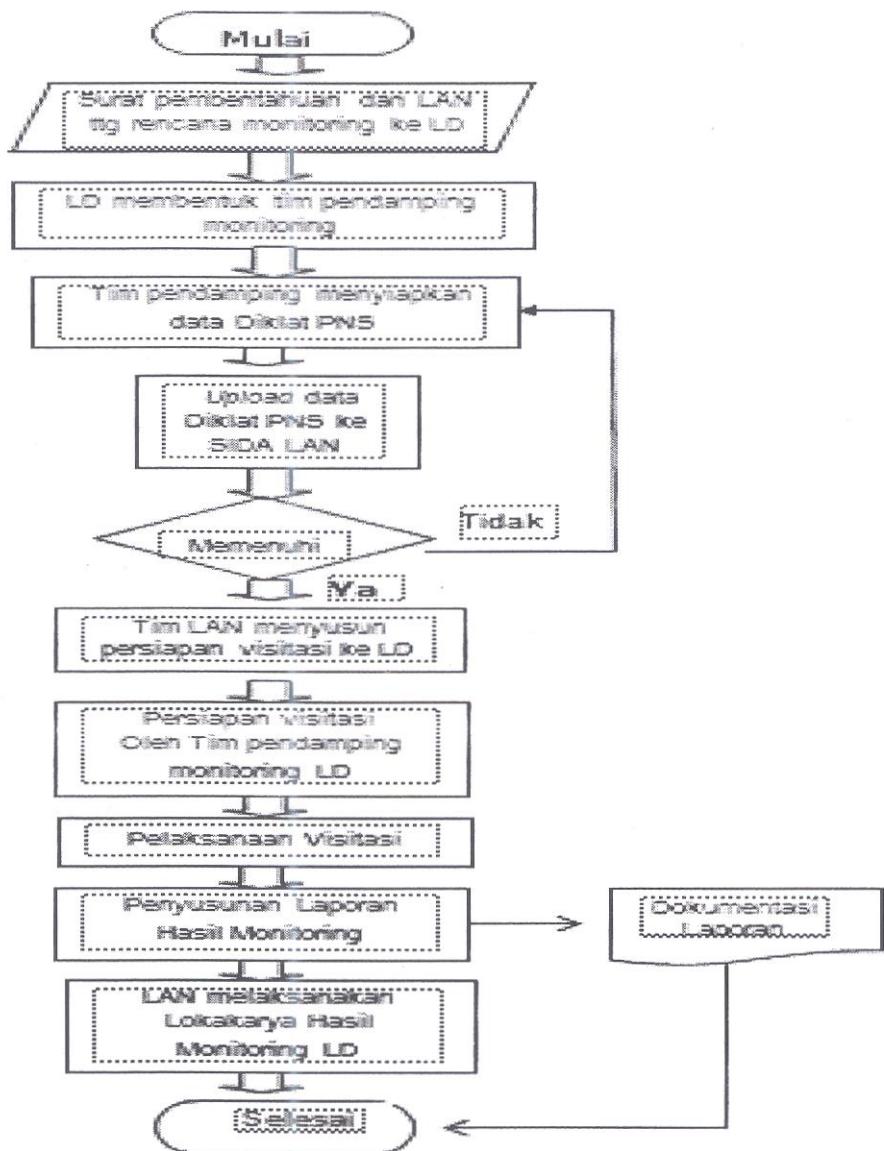
E. TAHAPAN PENYUSUNAN LAPORAN

Dalam tahapan ini, tim pemantauan dan pengendalian akan melakukan penyusunan laporan hasil pemantauan dan pengendalian. Pada tahapan ini ada dua kegiatan spesifik yaitu:

1. Penyusunan laporan hasil pemantauan dan pengendalian oleh tim pemantauan dan pengendalian LAN. Laporan hasil pemantauan dan pengendalian.
2. Penyusunan konsep penguatan jejaring kerja kediklatan sebagai langkah inisiasi pembuatan model pembinaan secara horizontal
3. Penyampaian gagasan pembinaan kediklatan secara horizontal dapat dilakukan pada saat rapat koordinasi evaluasi

penyelenggaraan Diklat PNS yang dilaksanakan pada akhir tahun anggaran pada bulan November. Dalam rapat koordinasi ini, tim pemantauan dan pengendalian LAN akan memberikan laporan hasil penyusunan konsep penguatan jejaring kerja dan hasil monev kepada setiap Lembaga Diklat. LAN akan memberikan penghargaan bagi Lembaga Diklat yang secara konsisten menyelenggarakan Diklat PNS sesuai standar, dan memberikan masukan perbaikan kepada Lembaga Diklat yang belum melaksanakan diklat sesuai standar.

Secara lebih ringkas, tahapan-tahapan rangkaian kegiatan pemantauan dan pengendalian Diklat PNS ditunjukkan dalam gambar sebagai berikut:



4.1 Etika Tim Pemantauan dan pengendalian

Untuk menjaga kualitas dan keberlangsungan program Diklat PNS, tim pemantauan dan pengendalian harus memperhatikan dan menjalankan etika pemantauan dan pengendalian. Uraian atas etika bagi pemantauan dan pengendalian adalah sebagai berikut.

1. Pelaksanaan pemantauan dan pengendalian dan evaluasi Diklat PNS ditekankan pada penilaian kemajuan pelaksanaan pekerjaan Diklat PNS dan prediksi, kapan sisa pekerjaan Diklat PNS yang belum terlaksana akan diselesaikan dimana capaian kegiatan adalah kadar persentase pekerjaan yang telah dikerjakan oleh peneliti; dan
2. Tim Pemantauan dan pengendalian menyampaikan saran penyempurnaan untuk menambah wawasan dan kinerja akademik peneliti.
3. Tim pemantauan dan pengendalian melakukan pemantauan sesuai aturan yang telah ditentukan
4. Tim pemantauan dan pengendalian harus memahami panduan pemantauan dan pengendalian, mematuhi tata cara pemantauan dan pengendalian, dan menjaga integritas diri dan kredibilitas sebagai tim pemantauan dan pengendalian.
5. Tim pemantauan dan pengendalian menyerahkan kembali kepada pengolah data semua bukti hasil monev Diklat PNS berupa dokumentasi foto, video, dan dokumen lainnya.
6. Tim pemantauan dan pengendalian tidak dibenarkan menerima gratifikasi, honorarium, atau bentuk hadiah lain dari lembaga yang dimonitoring.

BAB III

PENYELENGGARAAN DIKLAT

A. GAMBARAN UMUM

Secara umum penyelenggaraan Diklat di lembaga diklat yang dikunjungi dilihat dari berbagai Kelembagaan, SDM Pengelola yang memuat kapasitas dan kompetensi sumberdaya pengelola yang dibuktikan dengan sertifikasi pengelola diklat yakni sertifikat MOT (*Management Of Training*), SDM Penyelenggara yang memuat kapasitas dan kompetensi sumberdaya pengelola yang dibuktikan dengan sertifikasi penyelenggara diklat yakni sertifikat TOC (*Training Officer Course*) karena memang selama ini LAN menjadikan TOC dan MOT sebagai salah satu indikator SDM pada lembaga diklat bersangkutan memiliki profesionalitas atau tidaknya dalam menyelenggarakan program kediklatan, aspek SDM berikutnya adalah widyaiswara yang memuat jumlah widyaiswara dan kompetensi serta rumpun spesialisasi ajar, perhitungan kebutuhan widyaiswara, dan penyelenggaraan program diklat yang meliputi: program diklat yang diselenggarakan/data penyelenggaraan diklat dan lulusan; kepesertaan; kurikulum; bahan ajar; metode pembelajaran; sarana dan prasarana; evaluasi dan anggaran penyelenggaraan diklat.

Dalam melakukan monitoring terhadap aspek- aspek tersebut diatas data- data sekunder di *cross-check* dengan hasil wawancara dan pengamatan langsung terhadap objek atau lokus di lapangan. Masukan juga diperoleh melalui wawancara dengan narasumber di lokus dan hasil pengamatan langsung serta melalui narasumber

eksternal atau pakar yang memang merupakan praktisi kediklatan. Narasumber pakar tersebut adalah para Pejabat struktural, widyaiswara dan pengelola diklat di PKP2A I LAN. Hasil *cross-check* antara data sekunder, hasil pengamatan, hasil wawancara dengan narasumber di lokus serta hasil wawancara dengan praktisi kediklatan dari PKP2A I LAN di kodifikasi sehingga menjadi potret umum dan database kediklatan berdasar aspek- aspek diatas. Hasil monitoring juga meliputi inventariasi masalah yang terjadi pada lembaga diklat baik yang bersifat general, teknis maupun yang sifatnya berdasarkan pada implikasi kebijakan kediklatan yang terjadi. Hasil FGD atau focus group discussion dengan narasumber baik dari LAN, para Kepala Badan Diklat di wilayah binaan PKP2A I LAN, Para Kepala BKD seJabanubati dan narasumber dari PKP2A I LAN diarah untuk menggali pemecahan masalah, masukan ataupun rekomendasi. Rekomendasi tersebut dapat bersifat teknis kepada lembaga/lokus bersangkutan maupun *review* kebijakan terhadap LAN sebagai regulator.

Dari hasil kegiatan monitoring terhadap 8 lokus lembaga diklat didapatkan beberapa data terkait dengan kelembagaan, sumber daya manusia yang terdiri dari pengelola, penyelenggara dan widyaiswara,sarana dan prasarana serta jumlah lulusan program diklat secara umum setiap lembaga diklat dalam penyelenggaraannya telah memenuhi standar sesuai peraturan yang telah ditetapkan.

Beberapa lembaga diklat atau Badan Diklat telah memiliki sertifikat ISO, selain memang semuanya telah terkreditasi baik secara kelembagaan maupun secara program diklat yang diselenggarakan.

Secara umum aspek kelembagaan untuk semua lokus monitoring dinilai sudah cukup mapan dan stabil sebagai sebuah satuan kerja yang yang memiliki tupoksi melaksanakan kegiatan kediklatan. Tenaga pengelola dan penyelenggara pada pusdiklat-pusdiklat sudah cukup memadai namun beberapa sumber daya manusia pada beberapa lembaga masih ada yang belum mengikuti diklat MOT untuk pengelola diklat dan diklat TOC untuk penyelenggara hal ini terjadi karena rotasi dari unit atau satker lain, namun pada prinsipnya yang bersangkutan akan segera mengikuti TOC maupun MOT. Untuk SDM widyaiswara beberapa lembaga diklat menilai memiliki cukup namun ada juga yang kekurangan, untuk menutupi kekurangan tersebut dilakukan pemanfaatan tenaga fasilitator dari lembaga lain atau pakar dari universitas.

Permasalahan lain yang terkait dengan kewidyaishwaraan, karena belum ada aturan atau kebijakan yang mengatur tentang spesialisasi mata diklat atau rumpun diklat, semua widyaiswara dapat mengajar mata diklat apapun khususnya untuk diklat prajabatan. Program-progam diklat yang dilaksanakan belum berbasis kompetensi karena belum tersedianya standar latih/kurikulum standar; Program diklat yang sudah terakreditasi terbatas pada Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III serta Diklat Kepemimpinan Tingkat III dan IV sehingga unit penyelenggara diklat belum sepenuhnya memiliki daya saing pada bidang-bidang lain sesuai kompetensinya; Pedoman standar kualifikasi pengajar belum tersedia sehingga kesulitan dalam penentuan pengajar. Pada saat ini penentuan pengajar hanya didasarkan kepada pengetahuan penyelenggara diklat mengenai keahlian/pengalaman/latar belakang pendidikan

seorang pengajar; *Networking* penyelenggara masih kurang sehingga mengalami kesulitan untuk memperoleh pengajar yang kompeten; Kemampuan widyaiswara untuk mengajar sebagian besar mata diklat masih terbatas sehingga masih memerlukan tenaga *outsourcing*; Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) internal yang kompeten untuk menunjang pelaksanaan kegiatan kediklatan masih terbatas, ini terjadi karena belum terpetakannya beban kerja pegawai sebagai dasar untuk pengembangan SDM internal; Perencanaan diklat belum sepenuhnya didasarkan pada data hasil *Training Need Analysis* (TNA), yang mengakibatkan diklat yang dilaksanakan terkadang tidak sesuai kebutuhan pasar.

Penyelenggaraan kediklatan secara umum sudah mengacu pada pedoman Kepala LAN untuk diklat Prajabatan maupun diklat kepemimpinan. Sarana dan prasarana pada pusdiklat tersebut dan badan diklat diatas sudah cukup memaidai untuk penyelenggaraaan diklat kecuali Pusdikajen untuk sarana asrama masih dinilai kurang apabila mengacu pada prasarana sesuai dengan pedoman kediklatan. Hal tersebut terjadi karena pusdikajen memiliki karakteristik pendidikan di Pusdikajen/TNI. Kurikulum diklat untuk diklat prajabatan dan kepemimpinan selama ini sudah mengacu kepada pedoman Kepala LAN namun demikian permasalahan yang muncul adalah belum adanya keseuaian antara modul yang ada, materi yang diajarkan widyaiswara dan soal- soal ujian diklat kepemimpinan khususnya, karena soal- soal ujian selama ini masih disusun di pusat hal ini juga disebabkan materi yang disampaikan widyaiswara lebih banyak pengemebangan dari pada materi inti yang ada pada modul.

B. KEBUTUHAN PENGUATAN KAPASITAS

Dari hasil kunjungan atau visitasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi diperoleh banyak masukan terhadap LAN dalam hal ini PKP2A I LAN. Apabila melihat kapasitas dari setiap lembaga diklat di wilayah binaan PKP2A I LAN yaitu Badan Diklat Provinsi Banten, Badan Diklat Provinsi Jabar, Badan Diklat Provinsi Badan Diklat Provinsi Jateng, Badan Diklat Provinsi DIY, Badan Diklat Provinsi Jatim, Badan Diklat Provinsi Bali, Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Provinsi NTB dan Badan Diklat Provinsi NTT, ada lembaga yang memiliki kekuatan atau kapasitas yang sesuai, cukup adapula yang masih perlu dikembangkan. Namun dalam beberapa aspek sebenarnya dapat saling menutupi atau saling melengkapi apabila terjadi salin mendukung sesuai dengan kapasitas yang dimiliki. Begitupula dengan masukan dari para pengelola kepegawaian (BKD) bahwa harus ada sinkronisasi antara diklat yang diselenggarakan dengan kebutuhan diklat atau formasi diklat yang menjadi kewenangan BKD dalam menentukan, baik melalui AKD maupun kebutuhan atas dasar persyaratan jabatan seperti diklatpim atau diklat prajabatan.

Untuk itu sebagai langkah bentuk pembinaan PKP2A I LAN dapat menginisiasi untuk melakukan pemebntukan penguatan jejaring kerja yang juga fokus dalam penguatan kapasitas antar lembaga diklat. Tentunya hal ini tidak harus dilakukan oleh PKP2A I LAN saja, namun juga dapat dilakukan oleh lembaga- lembaga diklat yang memiliki sumberdaya yang dapat saling menguatkan dan melengkapi sehingga penyelenggaran diklat aparatur diwilayah jawa, Bali Nusa

Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur dapat sesuai dengan harapan yakni berkualitas dan profesional.

Untuk dapat mewujudkan hal tersebut maka diperlukan konsep yang sesuai dimana dapat disusun sesuai masukan- masukan dari para kepala Badan Diklat maupun Kepala BKD dilingkungan Jabarubati maupun para narasumber FGD Kediklatan. Sehingga jaringan diklat jawa bali nusa tenggara barat dan nusa tenggara timur dapat menjadi sarana penguatan kapitas bagi lembaga- lembaga diklat, disisi lain dapat menjadi sarana pembinaan secara horizontal bagi LAN sendiri.

BAB IV

MODEL PENGUATAN JEJARING KERJA KEDIKLATAN

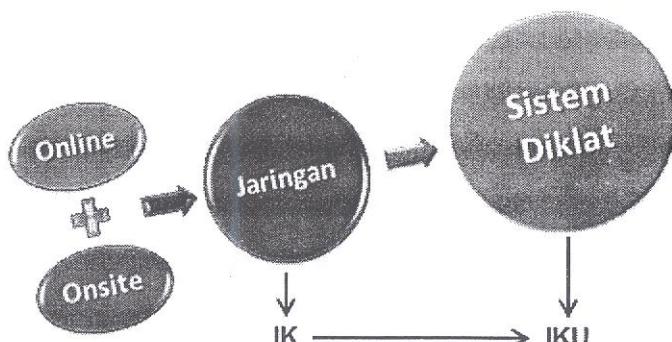
A. URGENSI PENGUATAN JEJARING KERJA

Tuntutan zaman dimana era globalisasi saat ini adalah suatu kenyataan bahwa tidak ada satu entitas yang mampu berdiri sendiri terpisah dari entitas yang lain. Secara garis besar, kita sangat membutuhkan Jejaring Kerja (*networking*) untuk menjadikan kehidupan kita lebih sukses. Di era moderen seperti saat ini keberhasilan sebuah lembaga atau organisasi masih sangat bergantung pada keberhasilan menciptakan Jejaring Kerja (*networking*). Dengan kata lain, menjalin hubungan sosial dengan siapa pun menjadi bagian penting dalam segala aktivitas pekerjaan dan tugas. Membangun Jejaring Kerja (kemitraan) pada hakikatnya adalah sebuah proses membangun komunikasi atau hubungan, berbagi ide, informasi dan sumber daya atas dasar saling percaya (*trust*) dan saling menguntungkan diantara pihak-pihak yang bermitra yang dituangkan dalam bentuk komitmen bersama guna mencapai kesuksesan bersama yang lebih besar.

Lembaga Administrasi Negara sebagai lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan yang salah satunya ada pembinaan kediklatan. Sesuai dengan amanat Undang- undang ASN. Undang- undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara mengamanatkan bahawa Lembaga Administrasi Negara memiliki fungsi diantaranya pengembangan standar kualitas pendidikan dan pelatihan Pegawai ASN; pembinaan pendidikan dan pelatihan kompetensi manajerial Pegawai ASN; penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan

kompetensi manajerial Pegawai ASN baik secara sendiri maupun bersama-sama lembaga pendidikan dan pelatihan lainnya; melakukan akreditasi lembaga pendidikan dan pelatihan Pegawai ASN, baik sendiri maupun bersama lembaga pemerintah lainnya. Untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsi diatas tentunya Lembaga Administrasi Negara harus memiliki jejaring kerja kediklatan yang kuat dan mapan, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut dapat dilaksanakan dengan efektif. Untuk itu penguatan jejaring kerja kediklatan harus dilakukan, selain memang karena alasan diatas beberapa lembaga diklat pada saat tim monitoring melakukan visitasi dan menyampaikan gagasan penguatan jejaring kerja, semuanya menilai memang perlu dibangun jejaring kerja tersebut.

Jardiklat: Sistem Pendukung Diklat



Urgensi kenapa harus dibangun penguatan jejaring kerja dan sarananya adalah sebagai berikut:

- a. Keterbatasan sumber daya yang dimiliki Lembaga Administrasi Negara khususnya di PKP2A I LAN dalam melaksanakan tugas turunan dari LAN RI
- b. Luasnya jangkauan wilayah binaan PKP2A I LAN, wilayah binaan PKP2A I LAN adalah Banten sampai NTT, dengan luasan tersebut tentu tidak serta merta hubungan komunikasi dapat dilakukan secara intens.
- c. Keterbatasan biaya atau anggaran pembinaan dalam bentuk pemantauan pengendalian maupun kegiatan pembinaan lainnya.

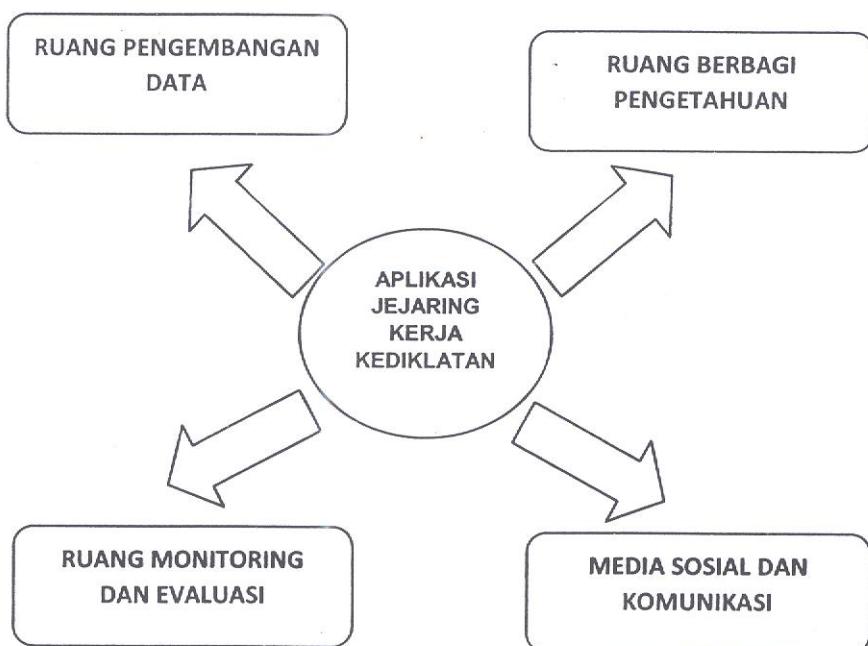
B. MODEL PENGUATAN JEJARING KERJA DAN MANFAAT KEMITRAAN

Salah satu upaya PKP2A I LAN dalam melakukan tugas pembinaan adalah dengan penguatan jaringan kerja kediklatan di lingkungannya. Penguatan jejaring kediklatan atau mitra kerja kediklatan ini membutuhkan upaya yang kuat melalui komunikasi dan koordinasi yang efektif dan sistematis. Butuh energi dan biaya yang besar untuk menyatukan pertukaran informasi dan berbagi pengetahuan antar penyelenggara diklat dalam suatu waktu apabila setiap upaya penguatan jaringan kerja tersebut dilakukan secara manual atau konvensional.

Infrastuktur teknologi informasi berbasis internet adalah salah satu pilihan untuk melakukan penguatan jaringan kerja secara efektif dan efisien. PKP2A I LAN dalam hal ini bidang diklat aparatur sedang

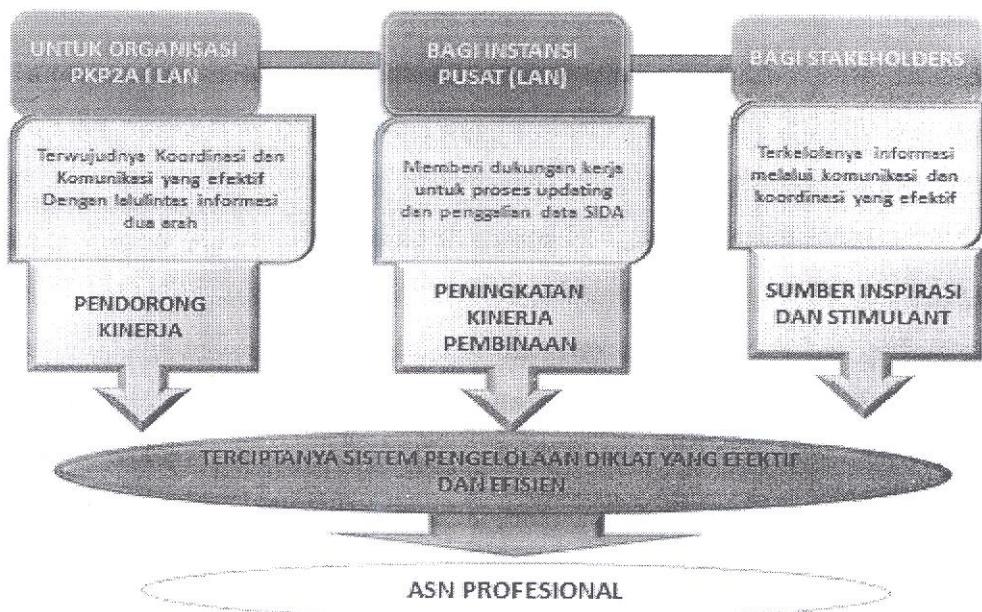
dalam perlu menyusun aplikasi sistem informasi yang dapat menjadi sarana dalam membangun komunikasi, koordinasi, dan berbagi pengetahuan bidang kediklatan. Adapun gambaran kebutuhan model aplikasi yang dapat dibangun sebagai instrumen penguatan jejaring kerja harus sesuai dengan kebutuhan, adapun gambaran sebagaimana hasil diskusi dan masukan dari narasumber adalah sebagai berikut berikut:

Gambar. Model Aplikasi Penguatan Jejaring Kerja Kediklatan



Adapun gambaran umum dari aplikasi ini dapat memberikan manfaat atau fungsi sebagaimana manfaat secara umum dalam aplikasi

penguatan jejaring kerja kediklatan dapat di lihat pada gambar berikut dibawah ini:



Gambar Manfaat umum konsep penguatan jejaring kerja kediklatan melalui Jardiklat Jabanubati

a. Ruang Pengembangan Data

Ruang pengembangan data ini dapat berisi informasi data- data seperti data penyelenggraan diklat berjalan beserta atributnya seperti kepesertaan, kelulusan, peserta terbaik, dan sebagainya; data perencanaan diklat; data kepegawaian pengelola dan stafnya, serta data widyaiswara, di samping itu ada juga data formasi diklat setiap daerah provinsi.

Ruang ini dapat ditujukan untuk menjadi media saling bertukar informasi antar stakholder kediklatan di lingkungan Jabanubati. Data-data yang diinput secara mandiri oleh Badan- badan diklat maupun antar BKD akan menjadi informasi yang bermanfaat bagi masing-masing lembaga, baik lembaga diklat maupun lembaga pengelola kepegawaian, disamping juga dapat memberikan manfaat informasi bagi aparatur sipil negara secara umum. Manfaat kongkritnya dalam hal ini dapat digambarkan seperti BKD dapat melihat informasi diklat yang diselenggarakan di Badan diklat di Provinsinya maupun badan diklat lain di lingkungan Jabanubati sehingga ketika ada kebutuhan pengiriman diklat tertentu dapat dengan mudah mencari informasi penyelenggaraan diklat, begitu pula dengan masyarakat umum dan ASN dapat dengan mudah mengetahui informasi- informasi penyelenggraraan diklat di Jabanubati. Bagi badan diklat sendiri informasi informasi dari BKD – BKD dapat menjadi target pasar penyelenggaraan diklat di daerahnya, dengan melihat formasi PNS yang harus didiklatkan, setiap Bandiklat dapat menentukan diklat-diklat yang harus diselenggarakan atau direncangkan oleh lembaga diklat sehingga akan efektif.

Di samping itu, untuk badan diklat- badan diklat yang membutuhkan widyaiswara dengan kompetensi tertentu, dapat mencari informasi kompetensi dan kepakaran widyaiswara di badan-badan diklat jabanubati sehingga memungkinkan pertukaran ataupun pemberdayaan widyaiswara di lingkungan jabanubati dapat terjadi secara regional.

b. Ruang Monitoring dan Evaluasi

Ruang monitoring ini berisi sistem informasi monitoring *online* dan sistem evaluasi pascadiklat *online*. Sistem monitoring *online* ini adalah sarana PKP2A I LAN dalam melakukan monitoring penyelenggaraan diklat yang terintegrasi dengan SIDA (sistem informasi diklat aparatur) LAN. Sistem ini memungkinkan lembaga diklat mengisi intrumen monev secara *online* (tinggal klik) secara otomatis data dapat langsung tersimpan di server PKP2A I LAN sehingga memudahkan untuk dilakukan verifikasi sebelum lembaga diklat divisitasi.

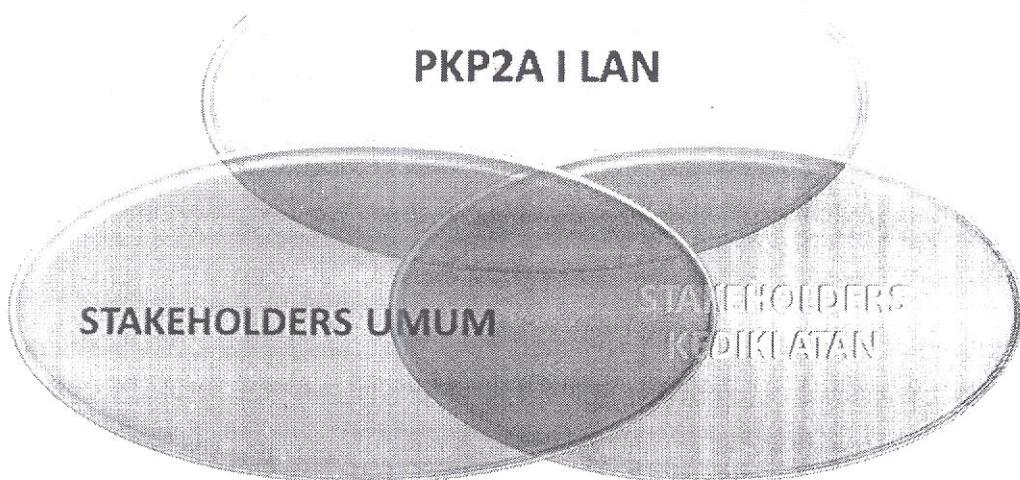
Sarana lainnya dalam aplikasi ini adalah form evaluasi pasca diklat yang dapat digunakan oleh tiap lembaga diklat untuk melakukan evaluasi pasca diklat secara *online*. Aplikasi ini menghemat biaya lembaga diklat dalam melakukan evaluasi pasca diklat. Secara umum konsep dari sistem monitoring yang perlu dibangun dalam aplikasi penguatan jejaring kerja adalah sebagai berikut:



c. **Ruang Konsultasi dan Berbagi Pengetahuan**

Aplikasi ini adalah aplikasi forum konsultasi bagi tiap lembaga diklat dalam melakukan komunikasi maya. Dalam forum ini setiap pertanyaan akan diklasifikasikan berdasar topiknya, sehingga apabila ada pertanyaan yang sama sudah ada jawabannya.

Sarana *sharing* pengetahuan dalam aplikasi ini berupa fasilitas *upload file* dan *download*. *File-file* yang disharing disini berupa bahan ajar, makalah, bahan tayang, RBPMD, RP, buku digital (*e-book*) maupun informasi lainnya yang sifatnya pengetahuan kediklatan.



d. **Jaringan Media Sosial dan Media Komunikasi**

Di era komunikasi berbasis internet saat ini media sosial memiliki peranan penting untuk membagikan informasi *update*. Dalam penguatan jejaring kerja ini PKP2A I LAN juga menyiapkan sarana media sosial seperti *facebook*, *mailinglist*, *twitter* dan *instagram* untuk berbagi informasi yang update antar mitrakerja kediklatan di

JABANUBATI ini. Selain itu group *whatsApps* juga menjadi sarana pertukaran informasi, koordinasi dan konsultasi secara cepat antar sesama mitrakerja.

e. Pemanfaatan Template Aplikasi Oleh Para Mitra Kerja Jabanubati

Software yang dikembangkan oleh PKP2A I LAN diaplikasikan dalam jejaring kerja pada lingkup Provinsi di wilayah Jabanubati, sehingga data dan jaringan kerja di wilayah Kabupaten/Kota tidak menjadi bagian jejaring kami karena bukan wilayah otoritas PKP2A I LAN. Kabupaten/Kota merupakan wilayah otoritas Lembaga Diklat dan BKD di masing-masing Provinsi. Oleh karena itu, apabila Lembaga Diklat Provinsi dan BKD Provinsi akan melakukan penjaringan data di Kabupaten/Kota di wilayahnya, selama komponen datanya sama dengan yang ada dalam software tersebut, maka perangkat itu dapat digunakan sebagai instrument *online*-nya. Setiap *Personal in Charge* (PIC) di masing-masing lembaga Diklat dan BKD Provinsi, akan kami berikan *Username* dan *Password* untuk bisa akses sekaligus menggunakan aplikasi ini.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pendidikan dan Pelatihan mempunyai posisi yang sangat strategis dalam tugas pengembangan kompetensi aparatur sipil negara, maka sudah seharusnya penyelenggaraan Diklat harus dilakukan dengan profesional, tidak hanya sekedar untuk pemenuhan kebutuhan formalitas saja. Agar penyelenggaraan Diklat dapat dilaksanakan secara profesional tentunya lembaga diklat harus memiliki komitmen terhadap kualitas. Kualitas dalam hal ini tentunya kualitas sesuai standar kediklatan yang sudah ditentukan. Dari hasil visitasi lapangan penyelenggaraan diklat di lembaga diklat seperti yaitu Badan Diklat Provinsi Banten, Badan Diklat Provinsi Jabar, Badan Diklat Provinsi Badan Diklat Provinsi Jateng, Badan Diklat Provinsi DIY, Badan Diklat Provinsi Jatim, Badan Diklat Provinsi Bali, Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Provinsi NTB dan Badan Diklat Provinsi NTT, semuanya memiliki program diklat kepemimpinan maupun diklat prajabatan yang telah terakreditasi.

Untuk dapat terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan diklat ditiap lembaga perlu ada jejaring kerja kediklatan yang lebih tersistem dan menggabungkannya dengan pengelola kepegawaian atau badan kepegawaian daerah. Sehingga pembentukan jejaring kerja kediklatan menjadi kebutuhan mendesak untuk menutup gap kapasitas lembaga diklat dan saling memenuhi atau melengkapi antar lembaga diklat tersebut.

B. REKOMENDASI

Dari hasil telaahan hasil monitoring dan FGD (*focus group discussion*) dengan pejabat dan pakar kediklatan yang dijadikan narasumber dalam program monitoring ini beberapa hal yang menjadi rekomendasi untuk lembaga diklat dan LAN sendiri sebagai pembina adalah sebagai berikut:

- a. Perlu dilakukan pembuatan jaringan kerja kediklatan secara onliene maupun onsite;
- b. Pembinaan widyaiswara belum dilakukan secara sistematis sehingga diperlukan program pembinaan widyaiswara yang sistematis;
- c. LAN perlu menertibkan pembina diklat teknis agar penyelengara dikat didaerah tidak dibingungkan oleh pembina diklat teknis
- d. Perlu komitmen bersama agar jaringan kerja yang akan dibuat nanti dapat berdaya dalam mewujudkan cita-cita penyelengaraan diklat di jababukti berkualitas dan profesional.



**PUSAT KAJIAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR I
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**